



Sejarah Pemekaran Kabupaten Malinau (1999-2006)Datuk Divan¹, Muhammad Azmi², Muhamad Sopyan³¹ Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.² Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia³ Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFO*Article history:*

Received

09 Juli 2021

Accepted

14 Desember 2021

Available online

31 Januari 2022

*Kata Kunci:*Pemekaran, Malinau,
Kalimantan, Bulungan*Keywords:*Expansion, Malinau,
Borneo, Bulungan

ABSTRAK

Kabupaten Malinau pada awalnya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bulungan, pada 12 Oktober 1999 terjadi pemekaran daerah dimana Malinau pisah dari Kabupaen bulungan menjadi kabupaten sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya pemekaran dan bagaimana perkembangan Kabupaten Malinau setelah terjadinya pemekaran dari tahun 1999 hingga 2006. Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan metode sejarah 4 tahap yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya pemekaran Malinau menjadi sebuah kabupaten merupakan suatu keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang pada saat itu dipimpin oleh Bupati R.A. Besing. Dengan alasan bahwa wilayah Kabupaten Bulungan pada saat itu jika tidak dimekarkan akan mengalami kesenjangan karena memiliki wilayah yang sangat luas pada saat itu, makanya perlu baginya untuk memekarkan daerah ini menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan sendiri, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan. Setelah terjadinya pemekaran tentu pastinya membawa dampak bagi masyarakat Malinau, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

ABSTRACT

Malinau Regency was originally one of the sub-districts in Bulungan Regency, on October 12, 1999 there was a regional division where Malinau was separated from Bulungan Regency to become its own regency. The purpose of this study was to find out the background of the division and how the development of Malinau District after the division occurred from 1999 to 2006. This type of research is a historical research with a four-stage historical method which includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results showed that the background of the division of Malinau into a district was a decision taken by the Regional Government of Bulungan Regency which at that time was led by Regent R.A. Besing. On the grounds that the area of Bulungan Regency at that time, if not divided, would experience a gap because it had a very large area at that time, it was necessary for him to split this area into 3 regencies, namely Bulungan Regency itself, Malinau Regency, and Nunukan Regency. After the division took place, it certainly had an impact on the people of Malinau, both in terms of economy, education, and health.

How to cite:

Divan, D., Azmi, M., Sopyan, M. (2022). Sejarah Pemekaran Kabupaten Malinau (1999-2006). *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 106-116.

¹ Corresponding author.

E-mail addresses: datukdivan@gmail.com

PENDAHULUAN

Luasnya wilayah Indonesia memberikan dampak terhadap terlambatnya pembangunan di daerah-daerah yang sangat jauh dari pusat pemerintahan, bahkan masih begitu banyak daerah-daerah yang dapat dikatakan sangat tertinggal khusus di wilayah pulau Kalimantan. Ibukota negara yang terletak di pulau Jawa dan kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau membuat daerah-daerah di luar pulau Jawa sangat jauh tertinggal dari daerah-daerah yang ada di pulau Jawa (Sukwika, 2018). Namun, tidak sedikit juga daerah-daerah di pulau Jawa yang masih mengalami ketertinggalan jika di banding dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia.

Di pulau Kalimantan, hanya ada beberapa kabupaten/kota yang dapat bersaing dengan kota-kota besar yang ada di pulau Jawa (Lasabuda, 2013). Di Kalimantan Utara yang merupakan provinsi termuda di Indonesia hasil pemekaran dari provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015, hanya ada satu kota madya dan terkenal di luar provinsi Kalimantan Utara itu sendiri, yaitu Kota Tarakan. Padahal ada 4 kabupaten selain Kota Tarakan yang ada di Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan. Namun, kabupaten-kabupaten ini sangat tertinggal jauh kemajuannya dibanding dengan Kota Tarakan itu sendiri.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Utara. Luas wilayah Malinau mencapai 42.620,70 km² atau meliputi hampir 52,77% dari luas wilayah Kabupaten Bulungan sebelum pemekaran. Kondisi iklim yang sangat subur memungkinkan untuk memperkuat di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Ditambah juga dengan SDA yang relatif akrab dengan sektor-sektor yang ada. Bahkan sebagian besar masyarakat Malinau hidup dengan alam untuk memnuhi penghidupannya.

Kabupaten ini juga sering disebut Bumi Intimung, yang berasal dari bahasa Tidung "Intilon" artinya bergotong royong. Suku bangsa asli Malinau ada beberapa, diantaranya ada suku Dayak Tidung, Dayak Kenyah, Dayak Berusu, Dayak Tegal, Dayak Merap, Dayak Punan, Dayak Abay, dan Dayak Lun Bawang/Lun Dayeh. Malinau juga memiliki beberapa kebudayaan, antara lain Rumah Baloy, Tari Kencet Ledo, Tari Jepen, Tari Perang, dan lain sebagainya. Serta memiliki banyak wisata alam atau wisata buatan yang tersebar diberbagai daerah di Malinau (Risal, 2017).

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Malinau resmi menjadi

kabupaten pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan yang ditetapkan melalui undang-undang No. 47 Tahun 1999 (Ristanti & Handoyo, 2017). Pada awalnya Malinau adalah sebuah kawasan pemukiman yang semula dihuni suku Tidung. Daerah ini selanjutnya menjadi kampung, berubah menjadi kecamatan (Risal, 2017).

Menurut beberapa tokoh masyarakat dan tokoh adat, nama Malinau berasal dari sebuah ketidaksengajaan pada percakapan antara rakyat dengan bangsa Belanda yang datang bertanya mengenai nama sungai yang mengalir di desa tersebut. Rakyat yang tengah membuat sagu (Inau) tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh bangsa Belanda tersebut, mereka hanya mengira-ngira saja apa yang ditanyakan, kemudian menjawab Mal Inau yang artinya membuat sagu aren. Namun ternyata Belanda mencatat nama tersebut dan dipakai untuk menami daerah tersebut. Sampai saat ini Malinau telah dipimpin oleh 2 bupati dan 1 PLT bupati, dan akhir tahun 2020 telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (Marihandono, 2016).

Perkembangan Kabupaten Malinau setelah pemekaran sebagai kabupaten pada tahun 1999 hingga sekarang tentunya membawa dampak positif bagi kemajuan baik dibidang pemerintahan, infrastruktur, bahkan pendidikan sekali pun (Marihandono, 2016). Namun, Malinau masih kalah jauh dengan Kota Tarakan dan juga Kabupaten Bulungan dalam berbagai bidang, salah satunya dari segi infrastruktur pembangunan. Keterlambatan ini dikarenakan oleh berbagai faktor, diantaranya masih menjadi Kabupaten yang tergolong baru dan jauhnya akses untuk menuju ke Malinau yang tergolong sangat jauh.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti perlu untuk mengkaji dan meneliti terkait dengan sejarah dan perkembangan Kabupaten Malinau sebelum dan setelah pemekaran. Guna dapat menganalisis perkembangan Kabupaten Malinau dari tahun ke tahun sebagai sebuah kabupaten baru yang kemudian menjadi suatu kabupaten konservasi hingga sekarang.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan dan menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini berada di Kabupaten Malinau. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian Historis. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Menurut Sugiyono (2017) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder ada sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Anggito & Setiawan, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Pemekaran Kabupaten Malinau Menjadi Sebuah Kabupaten

Kabupaten Malinau dulunya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Yang mana pada saat itu ibu kota Kabupaten Bulungan adalah Kota Tanjung Selor, sekaligus merupakan pusat pemerintahan dan administrative Kabupaten Bulungan.

Jarak antara Kecamatan Malinau dengan pusat pemerintahan (Tanjung Selor) sangatlah jauh sekali. Hal itu diikuti dengan kondisi jalan yang sangat tidak mungkin untuk dilewati, makanya jalur transportasi yang umum digunakan dari Malinau ke Tanjung Selor atau sebaliknya menggunakan transportasi sungai (ketinting, speedboat, longboat, dan lain sebagainya).

Letak yang sangat jauh dan diikuti dengan jalur transportasi yang tidak memadai ini mengakibatkan susah pelayanan serta pemerataan pembangunan yang merata untuk seluruh wilayah di Kabupaten Bulungan saat itu. Kondisi mengakibatkan sulitnya masyarakat Malinau untuk dapat menikmati fasilitas dan pembangunan yang merata, serta memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

Pemekaran Malinau menjadi Kabupaten yang pada awalnya merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan tentunya memiliki proses yang secara administratif, perundangan, bahkan dapat dikatakan bukalah proses yang sebentar. Tentu pemekaran yang terjadi terhadap suatu daerah memiliki alasan tersendiri sehingga wilayah tersebut harus dimekarkan.

Pembentukan daerah otonom memiliki Undang-Undang tersendiri untuk mengatur pemekaran suatu daerah. Pemekaran Malinau diatur dalam Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Jika melihat dari Undang-Undang tersebut sudah pasti bukan hanya Kabupaten Malinau sendiri yang melakukan pemekaran, melainkan ada 3 kabupaten lain dan 1 kota yang juga dimekarkan menjadi daerah otonom sendiri.

Ada dua alasan mendasar terjadinya pemekaran Kabupaten Malinau, pertama dikarenakan keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang pada saat itu dipimpin oleh bupati yang bernama R.A. Besing untuk memekarkan daerah ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Bulungan saat itu sehingga sulit baginya untuk melakukan pemerataan pembangunan. Kedua, karena keinginan masyarakatnya untuk mendapat akses pelayanan

langsung dari pemerintah sehingga membuat masyarakat Malinau saat itu ingin adanya pemekaran menjadi sebuah kabupaten sendiri terpisah dari Kabupaten Bulungan. Kondisi Malinau yang pada saat sebelum pemekaran tersebut sangatlah tertinggal, salah satu faktornya dikarenakan jauhnya akses untuk mencapai daerah tersebut. Sehingga membuat Pemerintah Kabupaten Bulungan tidak dapat melakukan pemerataan pembangunan secara efisien dikarenakan luasnya wilayah yang dikelolanya.

Pembangunan yang begitu lambat mengakibatkan masyarakat sulit untuk berkembang, terlebih dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang sangat jauh. Antara daerah di dekat pemerintahan dengan daerah yang sangat jauh pada saat itu sangat berbeda, kesenjangan begitu dirasakan. Walaupun pada saat itu jika secara potensi Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia, Malinau mampu mengolah kehidupannya secara mandiri. Dalam artian untuk bertahan hidup, masyarakat dapat memanfaatkan hasil-hasil alam yang tersedia di bumi Malinau yang terkenal akan kekayaan hasil alamnya.

Ketertinggalan itulah membuat Malinau mendapat predikat Daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, Terbelakang). Makanya oleh sebab itu Pemerintah Bulungan berinisiatif untuk memekarkan daerahnya, sehingga pemerataan pembangunan dapat dilaksanakan dan kesenjangan dapat teratasi. Dapat dikatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan merupakan keputusan yang sangat tepat, memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau itu untuk membangun daerahnya sendiri secara otonom.

Pada awalnya. Pemekaran Malinau menjadi kabupaten sendiri hanya terdiri dari lima kecamatan yaitu, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Malinau, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, dan Kecamatan Kayan Hulu. Dan pada tahun 2002 Pemerintah Daerah Malinau melakukan pemekaran dari lima kecamatan menjadi 9 kecamatan, sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1) Kecamatan Kayan Hulu | 6) Kecamatan Malinau Barat |
| 2) Kecamatan Sungai Boh | 7) Kecamatan Kayan Hilir |
| 3) Kecamatan Malinau | 8) Kecamatan Mentarang |
| 4) Kecamatan Malinau Utara | 9) Kecamatan Pujungan |
| 5) Kecamatan Malinau Selatan | |

Pemekaran kecamatan ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan secara efisien dikarenakan luas wilayah Kabupaten Malinau yang sangat besar. Dengan adanya pemekaran

kecamatan ini membuat juga tiap desa yang jauh atau pedalaman mampu digapai oleh pemerintah kecamatan setempat.

Kemudian pada tahun 2007 kembali melakukan pemekaran kecamatan yang sebelumnya berjumlah Sembilan kecamatan menjadi dua belas kecamatan, antara lain sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Kecamatan Kayan Hulu | 7) Kecamatan Kayan Hilir |
| 2) Kecamatan Sungai Boh | 8) Kecamatan Mentarang |
| 3) Kecamatan Malinau Kota | 9) Kecamatan Pujungan |
| 4) Kecamatan Malinau Utara | 10) Kecamatan Kayan Selatan |
| 5) Kecamatan Malinau Selatan | 11) Kecamatan Bahau Hulu |
| 6) Kecamatan Malinau Barat | 12) Kecamatan Mentarang Hulu |

Berdasarkan pemekaran tersebut pemerintah daerah menetapkan secara lebih rinci ibukota dari Kabupaten Malinau adalah Kecamatan Malinau Kota, sebagai pusat administratif, pusat transportasi, dan pusat pemerintahan.

Perkembangan Malinau Setelah Menjadi Kabupaten

Sebagai salah satu daerah yang baru hasil dari pemekaran Kabupaten Bulungan sejak tahun 1999 dan seiring era otonomi daerah yang efektif berjalan. Kabupaten Malinau sedang giat-giatnya membangun sarana dan prasarana yang memadai guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakatnya. Perkembangan perekonomian Kabupaten Malinau pasca pemekaran dalam rentan tahun 2000 – 2006 juga mengalami kenaikan, terlebih dalam tingkat Pendapatan Daerah. Dapat dikatakan bahwa pemekaran ini membawa dampak yang terbilang positif bagi Kabupaten Malinau itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi ini pada tahun 2006 mencapai Rp. 568, 13 milyar, yang pada turun tahun 2000 – 2006 dapat dikatakan bahwa tidak adanya kenaikan secara besar-besaran pasca pemekaran. Perkembangan ini tentu di dorong oleh berbagai sektor yang ada, baik itu dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, maupun dari sektor migas ataupun non migas. Ditambah lagi dengan datangnya para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Malinau, paling besar dari sektor sumber daya alamnya.

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencetak sumber daya manusia yang potensioal dan produktif bagi pembangunan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Dalam menghadapi perkembangan Iptek dan pembangunan, peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah mutlak diperlukan. Penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan terlaksananya pemekaran Kabupaten Malinau ini tentunya membawa perubahan dan peningkatan di bidang pendidikan, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sarana dan prasarana juga akan mengalami peningkatan atau bisa disebut sebagai pemerataan infrastruktur pendidikan di tingkat daerah, yang pada kenyataannya Malinau sebelum pemekaran sangat tertinggal dari segi pendidikan.

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Malinau khususnya pada fasilitas pendidikan mengalami kenaikan jumlah sekolah dari jenjang Sekolah Dasar hingga Menengah Keatas. Dimana sebelum terjadinya pemekaran, sarana dan pra-sarana pendidikan di Malinau sangatlah kurang, hal ini membuat terjadinya kesenjangan pendidikan pada saat itu. Bertambahnya infrastruktur pendidikan ini juga menunjang naiknya tingkat minat sekolah pada masyarakat Malinau sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah dan menjangkau daerah-daerah yang kekurangan akses pendidikan. Hal ini membawa dampak positif dalam proses keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Malinau untuk dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Sarana dan pra-sarana kesehatan tentunya juga harus ditunjang dengan maksimal, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui tingkat kesehatan yang baik. Untuk kenaikan pelayanan sarana dan pra-sarana kesehatan sendiri, di lihat dengan bertambahnya fasilitas kesehatan serta diikuti dengan bertambahnya jumlah tenaga medis yang berimbang. Kabupaten Malinau setelah pemekaran turut mengalami pertambahan jumlah sarana dan pra-sarana kesehatan, yang puncaknya pada tahun 2004 telah berdiri sebuah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Malinau. Tentu dapat dikatakan bahwa ini adalah dampak positif di aspek pelayanan kesehatan di Kabupaten Malinau, guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang dekat dan berada di daerah sendiri.

Bertambahnya fasilitas kesehatan juga diikuti dengan bertambahnya kebutuhan tenaga kesehatan yang memadai. Tenaga medis ini ditunjang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal terhadap masyarakat Kabupaten Malinau, yang pada kenyataannya kebutuhan akan tenaga medis bertambah mengikuti bertambahnya tingkat kebutuhan kesehatan masyarakat Kabupaten Malinau. Pada periode tahun 2000 – 2006 tenaga medis yang ada di Kabupaten Malinau mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja tiap instansi kesehatannya, yang dimana pada tahun 2006 telah terdapat sebanyak 216 tenaga kesehatan. Angka itu tentu dapat dikatakan kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Malinau sebanyak 50.692 jiwa pada tahun 2006.

SIMPULAN

Pemekaran Kabupaten Malinau dari Kabupaten Bulungan dipengaruhi oleh ketidakmerataan pembangunan yang terjadi antara daerah disekitaran pusat pemerintahan dengan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Juga tidak lepas dari perlunya masyarakat untuk mendapat akses yang memadai dari pemerintah daerah pada waktu itu, masyarakat yang sangat serba kekurangan baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan tentu mendorong Pemerintah Kabupaten Bulungan pada kala itu untuk memekarkan daerahnya, sehingga salah satu keputusannya adalah menjadikan Malinau menjadi kabupaten sendiri yang memiliki otonominya sendiri. Pemekaran ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Perkembangan Kabupaten Malinau setelah pemekaran ini terlihat, baik dari bidang ekonomi mengalami kenaikan Pendapatan Daerah yang signifikan setiap tahunnya terhitung dari tahun 2000 - 2006. Lalu pada bidang pendidikan juga adanya kenaikan baik dari sarana maupun pra- sarana, jumlah sekolah setiap jenjang pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat Menengah ke atas terjadi kenaikan bahkan untuk jumlah muridnya tiap tahun mengalami penambahan. Terakhir, dari bidang kesehatan juga mengalami kenaikan baik dari fasilitas kesehatan yang berupa sarana dan pra-sarana maupun dari tenaga medisnya, bahkan telah terbangun Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Malinau pada tahun 2005. Pembangunan yang setiap tahunnya terus dibangun, baik dari segi infrastruktur jalan dan tata ruang maupun dari infrastruktur pendidikan perlahan mengalami pemerataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arifin, M. Z. (2019). Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi. Researchgate, 1(1), 1–5.
- Aryunto, P. (2011). Pengaruh Perkembangan Ekonomi Kota terhadap Struktur Ruang Kota (Studi Kasus Kabupaten Gresik). Jurnal Institut Teknologi Sepuluh November, 1–15.
- Asran Jalal, A. J. (n.d.). Kekuasaan Presiden Di Indonesia.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi. Jurnal Politik Profetik, 2(1).
- Badan Pusat Statistik. (2002). Malinau Dalam Angka 2001. Samarinda : Krama Agung.

- Badan Pusat Statistik. (2005). *Malinau Dalam Angka 2004*. Yogyakarta : Ash Shaff.
- Badan Pusat Statistik. (2007). *Malinau Dalam Angka 2006*. Samarinda : Krama Agung.
- Bappeda Tingkat II Kabupaten Bulungan. (1987). *Rencana Pengembangan Kawasan Sesayap dan Malinau Di Kalimantan Timur*. Bulungan : BAPPEDA.
- Hakim, A., Hamidi, W., & Tampubolon, D. (2017). *Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Kabupaten Bengkalis)*. Riau University.
- Hamrin, H., & Tanjung, A. (2020). *Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. *National Journal of Law*, 2(1).
- Harahap, F. R. (2013). *Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia*. *Society*, 1(1), 35–45.
- Hsb, A. M. (2019). *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Huda, N. (2006). *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Hukum Ius Quia IusTum*, 13(1), 27–37.
- Irwanto, D., & Alian, S. (2014). *Metodologi dan historiografi sejarah*. Eja_Publisher, Yogyakarta.
- Lasabuda, R. (2013). *Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2), 92–101.
- Marihandono, D. (2016). *Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat: Sumber Sejarah dan Permasalahannya*. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 1(2), 132–151.
- Marliani, W., & Nurhalimah, S. (2020). *Dinamika Politik Dalam Perspektif Kepemimpinan Di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1).
- Moonti, R. M. (2017). *Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 26–37.
- Muqoyyidin, A. W. (2016). *Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan*. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 287–310.
- Musa, M. I. (2015). *Dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia*. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3).
- Nasional, B. P. P. (2008). *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah*. Jakarta: UNDP.

- PERMANA, Y. S. (2012). Pengaruh Perubahan Status Kota Terhadap Perkembangan Kota Tasikmalaya. Universitas Gadjah Mada.
- Ramdhani, H. (2019). Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 219–226.
- Ratnawati, T. (2010). Satu dasa warsa pemekaran daerah Era reformasi: Kegagalan otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Politik*, 21, 122–235.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 : Jakarta.
- Risal, M. (2017). Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau). *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 4(2), 106–126.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115–122.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18–26.
- Sudrajat, A. S. (2010). Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 7(3), 1.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19).
- Sukwika, T. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115–130.
- Sumarlis, S. (2018). Kajian Tujuan Pemekaran Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 (Studi Kasus: desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman). *JURNAL PERENCANAAN, SAINS DAN TEKNOLOGI (JUPERSATEK)*, 1(1), 119–132.
- SURYANSYAH, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kota Banjarbaru. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2).
- Suwitri, S. (2004). Pelayanan publik dan kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik (JIAKP)*, 1(1).
- WEISHAGUNA, W., & SAODIH, E. (2007). Morfologi Sebagai Pendekatan Memahami Kota. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota UNISBA*, 7(2), 56–67.
- Widyantari, E. (2012). Perkembangan fisik kota Madiun tahun 1998-2008. Universitas Gadjah Mada.

- Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. VisiMedia.
- Zarkasi, A. (2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 2(4).